

ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021-2023

Dinda Dwi Kirana^{1*}, Siti Atika Rahmi², & Sulhan Hadi³

^{*1-3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Mataram

e-Mail: dindadwikirana0410@gmail.com, atikarahmi.siti@gmail.com,
sulhanhadi1212@gmail.com

Submit Tgl: 27-Juli-2026

Diterima Tgl: 25-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 01-September-2026

Abstract: *Regional autonomy requires district/city governments to finance Regional Expenditure from two main sources: Locally-Generated Revenue (PAD) and Central Government Transfers. Ideally, regions should prioritize PAD as a reflection of fiscal independence; however, the dependency ratio on transfer funds in many districts/cities in West Nusa Tenggara (NTB) Province remains above 70–80 percent, indicating a potential flypaper effect, a condition in which Regional Expenditure is more responsive to transfer funds than to PAD. This study aims to obtain empirical evidence of the flypaper effect phenomenon on Regional Expenditure in districts/cities of NTB Province during the 2021–2023 period. The study employs a quantitative approach using panel data from 10 districts/cities (8 regencies and 2 cities) over three years, yielding 30 observations. Secondary data were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Analysis was conducted through descriptive statistics and panel data regression, with model selection determined using the Chow Test and the Lagrange Multiplier Test. The results indicate that the Common Effect Model (CEM) is the most appropriate estimation model. The regression results show that PAD has no significant effect on Regional Expenditure (coefficient 0.90; probability 0.3781 > 0.05), while Central Government Transfer has a significant positive effect (coefficient 0.55; probability 0.0290 < 0.05). Simultaneously, both variables significantly affect Regional Expenditure (F-statistic probability 0.0179), with the model explaining 25.77 percent of the variation in Regional Expenditure ($R^2 = 0.2577$). Although the PAD coefficient is numerically larger than the Transfer coefficient, only the Transfer variable is statistically significant, indicating the presence of a flypaper effect on Regional Expenditure in districts/cities of West Nusa Tenggara Province, which signals that regional fiscal independence still needs to be strengthened.*

Keywords: *Flypaper Effect; Locally-Generated Revenue; Central Government Transfer; Regional Expenditure; Panel Data Regression*

Abstrak: Otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai Belanja Daerah dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat. Idealnya, daerah mengutamakan PAD sebagai cerminan kemandirian fiskal, namun kenyataannya rasio ketergantungan terhadap dana transfer di banyak kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di atas 70–80 persen, yang mengindikasikan potensi terjadinya *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 10 kabupaten/kota (8 kabupaten dan 2 kota) selama tiga tahun, sehingga diperoleh 30 observasi. Data sekunder bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.

Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi data panel, dengan pemilihan model estimasi menggunakan Uji Chow dan Uji *Lagrange Multiplier*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Common Effect Model (CEM) merupakan model terbaik. Hasil regresi menunjukkan variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (koefisien 0,90; probabilitas $0,3781 > 0,05$), sedangkan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,55; probabilitas $0,0290 < 0,05$). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (probabilitas F-statistik 0,0179), dengan kemampuan model menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 25,77 persen ($R^2 = 0,2577$). Meskipun secara koefisien PAD lebih besar daripada Transfer, hanya variabel Transfer yang signifikan secara statistik, sehingga penelitian ini menemukan indikasi terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menandakan tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Flypaper Effect; Pendapatan Asli Daerah; Transfer Pemerintah Pusat; Belanja Daerah; Regresi Data Panel

Cara mengutip Kirana, D. D., Rahmi, S. A., & Hadi, S. (2026). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1744–1755. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2386>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau yang terbagi ke dalam 38 provinsi, yang di bawahnya terdapat kabupaten dan kota sebagai unit otonom dengan kedudukan yang setara secara administratif. Kondisi geografis dan administratif tersebut menjadikan desentralisasi sebagai kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Harpudiansyah, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat (Muhtadin, 2022).

Melalui mekanisme desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang komposisinya secara nasional terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer, dan Pendapatan Daerah yang Sah (Sutiyoso et al., 2023). Untuk memenuhi kewajibannya, pemerintah daerah kemudian melakukan Belanja Daerah, yaitu seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan (Bakhtiar & Ulang, 2023). Secara ideal, Belanja Daerah dibiayai dari PAD dan dana transfer pemerintah pusat (Fikki, 2021). Namun pada praktiknya, dana transfer kerap digunakan secara lebih dominan dibandingkan PAD, padahal daerah semestinya mampu mandiri menggali potensi PAD-nya sendiri agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Ketika respons belanja daerah lebih banyak mengikuti besaran dana transfer dibandingkan PAD, maka muncul fenomena yang dikenal sebagai *flypaper effect* (Rizki Ramadhani et al., 2022).

Fenomena ketergantungan fiskal ini tampak nyata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI tahun 2023 menunjukkan rasio ketergantungan (perbandingan Transfer terhadap Belanja Daerah) pada sebagian besar kabupaten/kota di NTB berada di atas 70 persen, bahkan

mencapai 87 persen di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur (Kemenkeu RI, 2023). Gambaran selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	PAD (Rp)	Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan
Kab. Bima	154.644	1.613.050	1.852.067	87%
Kab. Dompu	112.761	953.266	1.197.696	80%
Kab. Lombok Barat	341.535	1.336.910	1.740.037	77%
Kab. Lombok Tengah	262.570	1.853.774	2.261.190	82%
Kab. Lombok Timur	386.034	2.316.235	2.671.513	87%
Kab. Sumbawa	179.881	1.616.854	1.918.003	84%
Kota Mataram	474.853	1.055.252	1.653.900	64%
Kota Bima	51.449	654.147	829.916	79%
Kab. Sumbawa Barat	134.584	1.210.258	1.683.675	72%
Kab. Lombok Utara	206.015	746.365	1.057.028	71%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI (2023)

Rasio ketergantungan yang tinggi (mendekati atau di atas 80 persen) menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara rasio yang rendah mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih baik. Sebagai contoh, Belanja Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2023 mencapai Rp1.852.067 juta, sementara PAD-nya hanya sebesar Rp154.644 juta, yang berarti sebagian besar belanja tersebut tidak mungkin tercukupi tanpa dana transfer (Kemenkeu RI, 2023). Kondisi ketergantungan ini turut diperparah oleh dinamika fiskal terbaru, di mana pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTB diperkirakan tidak mampu menutup penurunan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp1 triliun—dari semula Rp3,4 triliun menjadi Rp2,4 triliun akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik—hanya melalui peningkatan PAD, yang menegaskan rapuhnya struktur pembiayaan daerah apabila terlalu mengandalkan transfer pusat (Hidayat et al., 2025).

Flypaper effect sendiri merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ketika transfer dari pemerintah pusat ke daerah mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah melebihi peningkatan yang seharusnya terjadi apabila belanja tersebut dibiayai dari peningkatan PAD (Suripto et al., 2024). Sejumlah penelitian terdahulu mengonfirmasi keberadaan fenomena ini di berbagai wilayah Indonesia. Jannah dan Amanah (2023) menemukan flypaper effect pada Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2021–2023, yang menunjukkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer sehingga pemerintah pusat masih ikut memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Farica dan Wijaya (2023) memperoleh temuan serupa di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta,

sementara Juniarta et al. (2025) menunjukkan hasil yang sejalan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Temuan-temuan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa Belanja Daerah pada banyak wilayah di Indonesia masih lebih dipengaruhi oleh dana transfer pusat dibandingkan PAD.

Periode 2021–2023 dipilih dalam penelitian ini dengan dua pertimbangan utama. Pertama, rentang waktu tersebut mencerminkan masa pemulihan pascapandemi COVID-19, ketika pemerintah pusat secara aktif meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat layanan publik, sehingga relevan untuk menilai apakah tambahan dana tersebut dikelola secara efisien atau justru memperkuat gejala *flypaper effect* (Muinel-Gallo, 2021). Kedua, periode ini bertepatan dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pengelolaan fiskal daerah, sehingga menjadi momen strategis untuk mengevaluasi pergeseran perilaku belanja daerah dalam merespons kebijakan fiskal baru tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2023. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai keberadaan fenomena tersebut, sekaligus menganalisis pengaruh PAD dan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman mengenai teori *flypaper effect* dan desentralisasi fiskal, khususnya pada konteks provinsi kepulauan dengan karakteristik fiskal yang relatif terbatas seperti NTB. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD serta bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam penyempurnaan kebijakan penyaluran dana transfer agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan antarwilayah (Yacoub & Lestari, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji *fenomena flypaper effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2023. Lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah administratif NTB yang terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel, yaitu gabungan data *time series* (tahun 2021–2023) dan *cross section* (10 kabupaten/kota), sehingga diperoleh 30 observasi. Data mencakup realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi Transfer Pemerintah Pusat, dan realisasi Belanja Daerah pada masing-masing kabupaten/kota. Seluruh data bersumber dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id), dan dilengkapi dengan bahan pendukung dari publikasi ilmiah, buku referensi, serta laporan kajian terkait (Manu et al., 2021).

Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (*sensus*), yaitu seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria dijadikan sampel penelitian, mengingat jumlah populasinya relatif kecil. Kriteria yang digunakan meliputi: (1) pemerintah kabupaten/kota di NTB yang

membuat, menghitung, serta menyampaikan Laporan Realisasi APBD secara lengkap pada tahun 2021–2023; dan (2) pemerintah kabupaten/kota di NTB yang menerima transfer pemerintah pusat selama periode tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB memenuhi syarat dan digunakan sebagai sampel penelitian.

Penelitian ini melibatkan dua variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Transfer Pemerintah Pusat (X2), serta satu variabel dependen, yaitu Belanja Daerah (Y). PAD mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU Nomor 33 Tahun 2004, 2004), sedangkan Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang dialokasikan pusat kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Seluruh variabel diukur dalam satuan rupiah berdasarkan data realisasi APBD.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan EViews. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum (Cahyani et al., 2025). Analisis regresi data panel dilakukan melalui tiga pendekatan model estimasi, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) (Basuki & Prawoto, 2021).

Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui dua tahap pengujian (Ghozali & Tedjasuksmana, 2019). Pertama, Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan antara CEM dan FEM, dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Cross-section F dan Chi-square lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah CEM, dan sebaliknya. Kedua, apabila CEM terpilih pada Uji Chow, maka dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan pilihan antara CEM dan REM, dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih tetap CEM, dan sebaliknya model yang dipilih adalah REM.

Selanjutnya, apabila model yang terpilih adalah CEM, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antarvariabel independen, di mana model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai korelasi lebih kecil dari 0,85. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati pola sebaran grafik residual, di mana model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai residual tidak melampaui batas atas maupun batas bawah yang ditentukan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan asumsi ceteris paribus, dengan kriteria variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha (0,05) (Sujarweni & Utami, 2019). Uji t sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi indikasi flypaper effect: apabila koefisien Transfer bernilai positif dan signifikan serta lebih dominan dibandingkan PAD, maka hal tersebut mengindikasikan Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel

dependen, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap 30 observasi yang mencakup 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2021–2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	PAD (Rp)	Transfer (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
Mean	209.922.578.668	1.271.202.820.715	1.596.131.654.090
Standar Deviasi	120.309.261.991	492.107.798.556	615.172.950.844
Minimum	46.993.516.747	624.035.340.074	716.700.153.287
Maksimum	474.853.860.322	2.317.594.237.235	3.089.302.246.686
N (observasi)	30	30	30

Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah (2026)

Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar Rp46.993.516.747 yang terjadi di Kota Bima pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar Rp474.853.860.322 yang terjadi di Kota Mataram pada tahun 2023, dengan rata-rata Rp209.922.578.668. Variabel Transfer Pemerintah Pusat memiliki nilai minimum Rp624.035.340.074 di Kota Bima tahun 2021 dan nilai maksimum Rp2.317.594.237.235 di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022, dengan rata-rata Rp1.271.202.820.715. Sementara itu, Belanja Daerah memiliki nilai minimum Rp716.700.153.287 di Kota Bima tahun 2021 dan nilai maksimum Rp3.089.302.246.686 di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022, dengan rata-rata Rp1.596.131.654.090. Standar deviasi ketiga variabel yang relatif besar dibandingkan rata-ratanya mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang cukup lebar antarkabupaten/kota di NTB, yang tercermin dari perbedaan signifikan antara daerah dengan basis ekonomi yang lebih kuat, seperti Kota Mataram dan Lombok Timur, dengan daerah yang basis fiskalnya masih terbatas, seperti Kota Bima.

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji *Lagrange Multiplier*. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,3619, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen, sehingga H_0 diterima dan model yang dipilih pada tahap ini adalah *Common Effect Model* (CEM), bukan *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk menguji apakah CEM tetap menjadi model terbaik dibandingkan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,5617, yang juga lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 kembali diterima dan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Berdasarkan hasil estimasi dengan pendekatan CEM, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{BDit} = 4,76 + 0,90 \text{ PADit} + 0,55 \text{ Transferit} + \text{uit}$$

Nilai konstanta sebesar 4,76 menunjukkan bahwa apabila PAD dan Transfer diasumsikan tetap, nilai Belanja Daerah berada pada angka tersebut. Koefisien PAD sebesar 0,90 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen berpotensi diikuti kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,90 persen dengan asumsi variabel lain konstan, sedangkan koefisien Transfer sebesar 0,55 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana Transfer sebesar 1 persen berpotensi meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,55 persen.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antara PAD dan Transfer sebesar 0,408775, yang berada jauh di bawah ambang batas 0,85, sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Adapun uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan mengamati pola sebaran grafik residual menunjukkan bahwa nilai residual tidak melampaui batas atas maupun batas bawah yang ditentukan (± 500), sehingga model regresi dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas dan bebas dari gejala heteroskedastisitas (Fransiska et al., 2022).

Pengujian Hipotesis

Hasil uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (Common Effect Model)

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Konstanta (C)	4,76	0,13
PAD (X1)	0,90	0,3781
Transfer Pemerintah Pusat (X2)	0,55	0,0290

$R^2 = 0,2577$ | Prob(F-statistic) = 0,0179 Sumber: Hasil olah data EViews (2026)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3781, yang lebih besar dari nilai alpha 0,05, sehingga secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini tidak terbukti. Sebaliknya, variabel Transfer Pemerintah Pusat memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0290, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga secara parsial Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dan hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0179, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa PAD dan Transfer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,2577 menunjukkan bahwa variasi Belanja Daerah mampu dijelaskan oleh PAD dan Transfer sebesar 25,77 persen, sedangkan sisanya sebesar 74,23 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian

ini, seperti Dana Alokasi Khusus, kapasitas ekonomi lokal, maupun kebijakan belanja masing-masing daerah.

Analisis *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan kondisi ketika Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh dana Transfer dari pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, yang mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah dan rendahnya kemandirian keuangan daerah (Pratiwi & Paramita, 2016). Secara teori, indikasi *flypaper effect* umumnya dilihat dari perbandingan besaran koefisien kedua variabel, di mana koefisien Transfer yang lebih besar dibandingkan PAD dianggap sebagai bukti kuat terjadinya fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien PAD (0,90) secara numerik lebih besar dibandingkan koefisien Transfer (0,55). Namun demikian, dari sisi signifikansi statistik, hanya variabel Transfer yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (probabilitas $0,0290 < 0,05$), sedangkan PAD tidak signifikan (probabilitas $0,3781 > 0,05$). Kondisi ini menghasilkan gambaran yang tidak sepenuhnya konsisten apabila hanya dilihat dari satu kriteria: berdasarkan besaran koefisien semata, Belanja Daerah tampak lebih responsif terhadap perubahan PAD; namun berdasarkan signifikansi statistik, justru dana Transfer yang secara nyata memengaruhi Belanja Daerah, sementara peningkatan PAD belum cukup kuat untuk mendorong perubahan Belanja Daerah secara signifikan (Sofhia & Priyambodo, 2024).

Mengingat kriteria *flypaper effect* pada dasarnya menilai variabel manakah yang secara nyata (signifikan) menjadi determinan utama Belanja Daerah, dan dalam penelitian ini variabel tersebut adalah Transfer Pemerintah Pusat, maka temuan ini mengindikasikan adanya flypaper effect pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2023. Pemerintah daerah pada dasarnya belum mampu menjadikan PAD sebagai determinan utama belanjanya secara statistik meyakinkan, sehingga Belanja Daerah tetap bergantung pada kepastian penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Jannah dan Amanah (2023) di Jawa Timur, Farica dan Wijaya (2023) di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Juniarta et al. (2025) di Jawa Timur, yang juga menemukan bahwa Belanja Daerah pada wilayah penelitiannya lebih dipengaruhi oleh dana transfer dibandingkan PAD.

Temuan mengenai pengaruh PAD yang tidak signifikan ini juga tidak sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh PAD signifikan terhadap Belanja Daerah, misalnya Audryna et al. (2025). Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh variasi kondisi keuangan daerah, kapasitas pengelolaan sumber daya, serta tingkat optimalisasi potensi ekonomi lokal pada masing-masing wilayah. Basis PAD di sebagian besar kabupaten/kota NTB, sebagaimana tampak pada statistik deskriptif, relatif kecil dan variatif dibandingkan dana Transfer, sehingga secara statistik pengaruhnya terhadap Belanja Daerah menjadi kurang meyakinkan meskipun arah hubungannya tetap positif. Kondisi ini memperkuat perlunya upaya optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti pajak dan retribusi daerah, agar kontribusinya terhadap pembiayaan Belanja Daerah dapat meningkat secara nyata (Frijunita et al., 2024).

Dari sisi kebijakan, hasil ini menegaskan bahwa peran dana Transfer Pemerintah Pusat—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah masih menjadi tulang punggung pembiayaan Belanja Daerah di NTB, sejalan dengan tujuannya untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Namun demikian, dominannya peran transfer secara statistik ini juga menandakan bahwa tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai di wilayah penelitian, sehingga optimalisasi PAD tetap menjadi agenda penting bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan (Nurosidah et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah, serta mengidentifikasi keberadaan fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan model Common Effect Model (CEM) yang terpilih melalui Uji Chow dan Uji Lagrange Multiplier, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2023 (koefisien 0,90; probabilitas $0,3781 > 0,05$). Meskipun arah hubungannya positif, kontribusi PAD belum cukup kuat untuk memengaruhi Belanja Daerah secara statistik meyakinkan.
2. Variabel Transfer Pemerintah Pusat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (koefisien 0,55; probabilitas $0,0290 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa dana dari pemerintah pusat masih menjadi faktor penentu utama besaran Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi NTB.
3. Secara simultan, PAD dan Transfer berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (probabilitas F-statistic 0,0179), dengan kemampuan model menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 25,77 persen. Karena hanya variabel Transfer yang terbukti signifikan secara statistik meskipun koefisien PAD secara numerik lebih besar, penelitian ini menemukan indikasi terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2023, yang menandakan tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk terus mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah, khususnya melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan aset daerah, agar kontribusinya terhadap pembiayaan Belanja Daerah dapat meningkat secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan dana Transfer secara lebih efektif dan tepat sasaran, terutama untuk mendorong penguatan basis ekonomi lokal yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD pada periode berikutnya. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan periode penelitian, menambah jumlah sampel atau wilayah kajian, serta memasukkan variabel tambahan seperti jenis-jenis dana transfer secara lebih terperinci (DAU, DAK, DBH) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Audryna, A., Haryono, Astarani, J., Rusliyawati, & Yantiana, N. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 6(10), 3417–3432. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i10.9219>
- Bakhtiar, B., & Ulang, B. P. (2023). The Relationship Between Expenditure and Regional Revenue of Palopo City in The Period 2019-2022. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(3), 418–425. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i3.4206>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada.
- Cahyani, V. M., Firmansyah, & Dwitayanti, Y. (2025). Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.
- Farica, W., & Wijaya, R. S. (2023). The Flypaper Effect Phenomena in Regional Expenditure in Districts/Cities of the Special Province of Yogyakarta. 3(4), 1347–1362.
- Fikki, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(2), 140–160. <https://doi.org/10.52490/jiscan.v3i2.28>
- Fransiska, W., Nugroho, S., & Rachmawati, R. (2022). A Comparison of Weighted Least Square and Quantile Regression for Solving Heteroscedasticity in Simple Linear Regression. *JSDS: Journal of Statistics and Data Science*, 1(1). <https://doi.org/10.33369/jsds.v1i1.21011>
- Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(2), 236–247. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
- Ghozali, I., & Tedjasuksmana, B. (2019). Pengaruh Leverage, Market-To-Book Ratio, Likuiditas dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Keputusan Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(2), 74–84.
- Harpudiansyah, F. I. (2023). Penentuan Wilayah Laut Antardaerah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Samudra Geografi*, 6(2), 145–148. <https://doi.org/10.33059/jsg.v6i2.7428>
- Hidayat, R., Khusaini, M., Kaluge, D., & Bintoro, N. S. (2025). Effective Strategies for Regional Budget Optimization in West Nusa Tenggara. *Lex Localis-Journal of Local Self-Government*, 23(11), 298–317.
- Jannah, R. D., & Amanah, L. (2023). Analisis Flypaper Effect dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 23.

- Juniartha, R. I. D., Nabila, S. K. M., Pribandari, W. A., Ulandari, W., & Ardhiarisca, O. (2025). Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 261–274.
- Kemenkeu RI. (2023). Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Manu, E., Akotia, J., Sarhan, S., & Mahamadu, A.-M. (2021). Identifying and Sourcing Data for Secondary Research. <https://doi.org/10.1201/9781003000532-2>
- Muhtadin. (2022). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. 2, 233–251.
- Muinelo-Gallo, L. (2021). Testing Regional Intergovernmental Transfers Effects in Uruguay. *Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época*, 4, 1–33.
- Nurosidah, S., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2022). Flypaper Effect: The Shifting Unconditional Transfer and Private Income in Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 5(4), 160–171. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i4.1935>
- Pratiwi, D. R., & Paramita, R. (2016). Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 208–224. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i2.97>
- Rizki Ramadhani, Farah Nisa Ul Albab, & Aryan Danil Mirza. BR. (2022). Does Flypaper Effect Really Exist? Evidence from Government Budget in East Indonesia. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)*, 4(2), 46–52. <https://doi.org/10.46923/ijbhes.v4i2.185>
- Sofhia, S., & Priyambodo, V. K. (2024). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota Mataram. *Indo-Fintech Intellectuals*. <https://doi.org/10.54373/ifiieb.v4i3.1425>
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book of SPSS. Anak Hebat Indonesia*.
- Suripto, Istanti, Setyawan, R. R., & Aulia, F. H. (2024). Flypaper Effect Phenomenon on Regional Spending: Evidence from Lampung Province. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 134–140. <https://doi.org/10.12928/optimum.v14i1.9482>
- Sutiyoso, Soetijono, I. R., & Anggraeni, R. A. R. (2023). Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 141–150. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3179>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Yacoub, Y., & Lestari, N. (2019). Flypaper Effect in Indonesia: The Case of Kalimantan. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 4(4), 116–121.
[https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.4\(1\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.4(1))